

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM LAYANAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH: PENDEKATAN MODEL VAN METER DAN VAN HORN

Suraji<sup>1</sup>, Jimmy Weku<sup>2</sup>, Yunita Maharani Subarja<sup>3</sup>

Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia

[suraji@ipdn.ac.id](mailto:suraji@ipdn.ac.id), [jimmyakademik@gmail.com](mailto:jimmyakademik@gmail.com), [yunayunita@gmail.com](mailto:yunayunita@gmail.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-07-12

Revised : 2026-07-18

Accepted : 2026-07-29

## KEYWORDS

Policy implementation;  
Population-Aware Schools; Van  
Meter and Van Horn; Nabire  
Regency

## KATA KUNCI

Implementasi kebijakan; Sekolah  
Siaga Kependudukan; Van Meter  
dan Van Horn; Kabupaten Nabire

## ABSTRACT

*This study aims to describe and analyze the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency, Central Papua Province, based on the Van Meter and Van Horn model. The study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, focus group discussions (FGDs), and documentation. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Population-Aware Schools Program in Nabire Regency has not been optimal; in fact, no schools have yet been officially registered as program implementers. The main obstacles include geographical conditions, limited budgets and resources, unclear coordination among organizations, suboptimal facilitation and outreach, and schools' limited capacity to integrate population education materials. Optimizing the program requires strengthening cross-sectoral coordination, increasing guidance, and providing resource and regulatory support at the local level.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire belum optimal, bahkan belum terdapat sekolah yang secara resmi terdaftar sebagai pelaksana program. Hambatan utama meliputi kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya, ketidakjelasan koordinasi antarorganisasi, belum optimalnya fasilitasi dan sosialisasi, serta keterbatasan kapasitas sekolah dalam mengintegrasikan materi kependudukan. Optimalisasi program memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pendampingan, serta dukungan sumber daya dan regulasi di tingkat daerah.

## 1. Pendahuluan

Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat khususnya generasi muda di sekolah-sekolah agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan dengan kehidupan masyarakat sehingga memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang. Sejak dicanangkannya program Pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan pada tahun 2015 dalam perkembangannya menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan capaian program masih jauh dari yang diharapkan. Di daerah yang relatif maju seperti di Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 persentase jumlah SSK untuk Sekolah Menengah Atas yaitu 20 dari 460 sekolah/4,3 %, untuk Sekolah Menengah pertama yaitu 113 dari 585/19,3 %. Kondisi yang sama dan bahkan lebih rendah capaiannya terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain rendahnya capaian dalam implementasinya ditemui banyak kendala. Rendahnya capaian program dan banyaknya kendala dalam implementasi berdampak pada tingginya permasalahan generasi muda seperti angka perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi dan rendahnya tingkat Pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh perkembangan teknologi. Hasil kajian dari Pusat kajian Kependudukan Universitas Indonesia banyak remaja terjebak pola hidup tidak sehat, malas bergerak/sedentary dan pernikahan dini. Isu sosial dan kesehatan pada remaja juga sangat tinggi seperti narkoba, merokok, minuman keras, makan minum instan/junkfood. Remaja juga banyak mengalami berbagai gangguan kesehatan mental seperti stress, depresi, kecemasan, rendahnya kepercayaan diri, cara berpikir kurang rasional, sulit konsentrasi dan rentan terhadap masalah kesehatan fisik, mental dan perilaku beresiko hukum.

Jika capaian program di wilayah yang relatif sudah maju saja masih rendah dan mengalami banyak hambatan dalam implementasinya maka menarik dicermati bagaimana Daerah Otonom Baru seperti Provinsi Papua Tengah termasuk didalamnya Kabupaten Nabire dengan tantangan yang lebih besar baik karena letak dan luasnya maupun berbagai keterbatasannya serta masalah kemiskinan, kualitas Pendidikan dan tingginya permasalahan pada generasi mudanya. Program ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah walaupun berhadapan dengan berbagai keterbatasan sehingga perlu

formula implementasi yang adaptif. Jika program tidak berjalan daerah tersebut beresiko semakin tertinggal karena generasi mudanya khususnya siswa sekolah tidak memperoleh kesempatan dan manfaat program layanan SSK.

Penelitian mengenai Program Sekolah Siaga Kependudukan sebelumnya lebih banyak membahas pelaksanaan program pada tingkat sekolah dan faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi program pada daerah dengan karakteristik geografis, kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya seperti Kabupaten Nabire masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada implementasi kebijakan Program Sekolah Siaga Kependudukan berdasarkan enam variabel Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program layanan SSK di Kabupaten Nabire berdasarkan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel-variabel pada implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn meliputi 6 (enam) variabel yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik agen Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan Sosial, Ekonomi dan politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Arikunto, 2014 :3) untuk meneliti implementasi program Layanan SSK di Kabupaten Nabire. Data primer diperoleh dari informan yaitu Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Disdaldud dan KB Kabupaten Nabire, Penyuluh /Petugas Lapangan KB, Kepala Sekolah, Guru, Staf Perpustakaan dan Siswa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Riduan, 2012 :16) yaitu pejabat dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan implementasi program SSK Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah wawancara, observasi, Focus Group Discussion (Sugiyono, 2013

:224). Pada observasi hanya dilakukan di 1 sekolah karena keterbatasan waktu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data model Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2013 :246) yang meliputi reduksi data dari berbagai data yang dikumpulkan, penyajian data baik berupa teks naratif maupun tabel, grafik dan gambar serta verifikasi data untuk menarik kesimpulan awal, verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir. Uji akurasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik (Sugiyono, 2015 : 373)

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Implementasi Program Layanan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire

Capaian pada program Layanan Sekolah Siaga Kependudukan oleh Perwakilan Kemendukbangga Provinsi Papua dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menunjukkan capaian yang sangat rendah bahkan untuk Kabupaten Nabire tidak ada satupun sekolah yang secara resmi terdaftar melaksanakan program Sekolah Siaga Kependudukan. Dari penjelasan Ibu Puspitaning Dian Pasifik, SSos dan Ibu Syurya Anisa, SKM sebagai Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja Pengendalian Penduduk bahwa Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua telah menjalankan peran dan kedudukannya diantaranya melakukan penandatanganan MOU dan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa institusi dan juga telah melaksanakan fasilitasi dalam rangka sosialisasi program SSK secara daring melalui Zoom Meeting. Namun secara kuantitatif pelaksanaan sosialisasi SSK ini sangat sedikit dilakukan. Pada aspek kebijakan menurut penjelasan Ibu MY salah satu Kasi di Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Bapak YH di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Pemprov Papua mengeluarkan kebijakan yaitu pengalihan kewenangan SMA dan SMK dari Provinsi ke masing-masing kabupaten Kota yang menyimpang dari kebijakan nasional. Hal ini secara langsung menghambat program Sekolah Siaga kependudukan.

Pada variabel Standar dan Kebijakan hasil penelitian adanya perubahan kebijakan kewenangan pembinaan Pendidikan oleh pemerintah provinsi di wilayah Papua menunjukkan terjadi kontradiksi fundamental antara standar regulasi nasional dengan daerah. Hal ini berpengaruh terhadap operasional di lapangan karena perbedaan peraturan, peraturan pelaksanaan menjadi kabur dan tidak selaras dengan petunjuk teknis nasional. Hal ini berdampak pada

pelaksanaan program SSK diantaranya yaitu kebingungan pada berbagai tingkatan mulai dari Perwakilan Kemendukbangga, tingkat OPD Pendidikan Provinsi dan OPD Pendidikan Kabupaten/Kota, tingkat OPD Kependudukan yaitu Dinas Dalduk dan KB di Kabupaten/Kota dan pada tingkat pengelola SSK yaitu Sekolah. Pada tingkatan Perwakilan Kemendukbangga perubahan kebijakan ini menyebabkan perubahan signifikan terhadap koordinasi dan fasilitasi yang harus dilakukan semakin besar karena harus berkoordinasi langsung ke semua dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Kota.

Perubahan kebijakan ini memiliki dampak langsung pada aspek sumber daya atau *resources* yaitu yaitu pada ada tidaknya alokasi anggaran, fasilitasi dan muatan materi kependudukan. Tidak mudah bagi pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire menyesuaikan kebijakan ini karena mengalami keterbatasan dana anggaran yang secara resmi tidak masuk dalam alokasi anggaran operasional. Perubahan kebijakan pengalihan kewenangan juga berpengaruh pada aspek hubungan antar organisasi. Pada tingkatan Perwakilan Kemendukbangga perubahan kebijakan ini menyebabkan perubahan signifikan terhadap jalur koordinasi vertikal. Perwakilan harus melakukan koordinasi dan fasilitasi yang semakin besar dan luas karena harus berkoordinasi langsung ke semua dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Kota. Selanjutnya mempengaruhi komunikasi antara Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan pada kabupaten/kota menjadi tidak sinkron. Dampak dari hal ini berakibat pada mandeknya administrasi yaitu instruksi-instruksi terkait program SSK dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN tidak lancar.

Perubahan kebijakan pengalihan kewenangan ini menyebabkan ketidaksesuaian secara struktur birokrasi karena pada tingkat dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tidak terdapat struktur untuk mengawasi Pendidikan SMA dan SMK. Dalam pelaksanaan SSK dampaknya yaitu pada agen pelaksana tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan supervisi dan evaluasi kurikulum SSK di tingkat SMA/SMK. Perubahan kebijakan pengalihan kewenangan ini menunjukkan bahwa tekanan politik lokal dalam hal ini Gubernur di wilayah Papua mengalahkan konsistensi pemenuhan target program nasional. Dampak terhadap pelaksanaan SSK yaitu program SSK dianggap bukan prioritas politik lokal di Kabupaten Nabire sehingga implementasinya dapat saja terabaikan oleh isu lainnya. Perubahan kebijakan ini juga

berpengaruh langsung terhadap disposisi implementor. Potensi timbulnya penolakan laten atau *resistance* dan inkonsistensi sikap para pelaksana di lapangan. Hal ini juga sesuai dengan temuan yaitu pejabat terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire yang mengakui tidak mengenal dan baru tahu sedikit tentang program SSK. Dampak terhadap implementasi SSK pada tingkat implementor yaitu sekolah kebingungan dan dapat kehilangan motivasi karena ketidakjelasan.

Salah satu penyebab rendahnya capaian target program SSK yaitu minimnya kegiatan fasilitasi dan sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Perwakilan Kemendukbangga Provinsi Papua dan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire. Analisa dari kondisi ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn memiliki korelasi pada ke enam variabel. Kegiatan fasilitasi dan sosialisasi merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait terkait standar dan sasaran kebijakan seperti target dan ketentuan pelaksanaan yang perlu dipahami oleh semua pihak terkait dan sekolah sebagai pelaksana. Minimnya fasilitasi dan sosialisasi dapat berakibat tidak dipahaminya secara utuh teknis pelaksanaan SSK atau pemahaman yang minimalis dan pemahaman yang tidak seragam. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu pada isian instrument evaluasi dan monitoring program SSK oleh 3 sekolah yang mengikuti kegiatan FGD di Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire yaitu tidak adanya guru yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan teknis pengintegrasian materi kependudukan dan program Bangsa Kencana ke mata pelajaran serta teknis menyusun RPP/Modul. Karena sifatnya teknis maka jika jika tidak pernah mengikuti pelatihan maka guru bisa saja hanya coba-coba ataupun tidak melaksanakan dengan alasan tidak tahu teknisnya atau alasan bingung bagaimana caranya. Dampak terhadap pelaksanaan SSK yaitu timbulnya pandangan bahwa SSK hanya menambah beban administrasi dan program SSK bukan prioritas dan tidak krusial.

Pada variabel sumber daya minimnya fasilitasi dan sosialisasi ini terkait dengan keterbatasan anggaran bahkan ketiadaan anggaran. Untuk melaksanakan faslitasi dan sosialisasi walaupun dilaksanakan secara daring tetap membutuhkan anggaran. Untuk kegiatan sosilisasi lebih efektif secara pertemuan langsung atau turun lapangan yang membutuhkan anggaran yang cukup. Apalagi jika

kondisinya juga kekurangan SDM terutama penyuluh/petugas lapangan dan kurangnya dukungan alat peraga dan modul yang didistribusikan ke sekolah. Pada variabel karakteristik agen pelaksana minimnya fasilitasi dan sosialisasi berdampak pada kompetensi yang rendah baik Penyuluh/Petugas lapangan KB juga guru pada sekolah sebagai pelaksana dalam hal teknis pelaksanaan SSK. Hal ini juga mempengaruhi pada mentalitas birokrasi yang menganggap program SSK hanya urusan satu bidang saja. Selanjutnya pada variabel hubungan antar organisasi dengan minimnya fasilitasi dan sosialisasi dapat berakibat tidak tersampainya dengan utuh instruksi-instruksi dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dan Dinas Dalduk dan KB sampai ke sekolah-sekolah.

Pada variabel kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik maka minimnya fasilitasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa isu kependudukan bukan sebagai prioritas utama politik lokal Pemerintah Kabupaten Nabire dan kalah bersaing dengan hal lain yaitu program MBG, program infrastruktur penurunan stunting. Pada variabel disposisi atau sikap para pelaksana, minimnya fasilitasi dan sosialisasi dapat menyebabkan rendahnya komitmen pada program dan hanya dijalankan secara formalitas saja bukan atas dasar kesadaran keberlanjutan program.

Temuan pada penelitian diantaranya yaitu para pejabat di lingkungan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire dan para Penyuluh/Petugas Lapangan KB diantaranya Ibu Arli Kus Wati dan Bapak Nur, SH menyampaikan hanya mengenal sekilas dan tidak ada satupun yang menyatakan pernah membaca Petunjuk Pelaksanaan Program SSK dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi SIMONEV pada program SSK. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan pada variabel Standar dan sasaran Kebijakan. Pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa standar kebijakan harus memuat ukuran-ukuran konkret yang dipahami oleh pelaksana agar keberhasilan program dapat diukur. Jika hanya mengenal sekilas maka pemahaman peraturan menjadi minim yang dapat berakibat menggunakan persepsi masing-masing yang dapat saja salah atau menyimpang. Juklak dan Juknis tersebut memuat hal-hal pokok dan bersifat teknis dan operasional untuk pedoman pelaksanaan program SSK. Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dan tranmisi informas yaitu tidak tersalurnya informasi

dengan baik sampai ke para pelaksana. Idealnya para pejabat terkait dan Penyuluh/Petugas lapangan KB menguasai regulasi teknis yang menjadi dasar bekerjanya artinya fakta ini berpengaruh terhadap variabel karakteristik misalnya sikap masa bodoh dan rendahnya komitmen dalam mengawal program SSK di sekolah.

Temuan pada penelitian selanjutnya dari hasil FGD yang diikuti oleh para pejabat di DPPKB Kabupaten Nabire, 3 perwakilan Sekolah dan seluruh Penyuluh/Petugas Lapangan KB terkait evaluasi pelaksanaan program SSK di sekolah yaitu sebagai berikut:

Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program SSK dan Pojok Kependudukan

| No | Macam Indikator                                                                                                   | SMA N 1 Nabire | SMA Al-Madina | SMP N 2 Wanggar |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | Sekolah memiliki Website                                                                                          | Ada            | Ada           | Ada             |
| 2  | Sekolah memiliki akun media sosial                                                                                | Tidak ada      | Ada           | Ada             |
| 3  | Sekolah memiliki dokumen SK penunjukan SSK                                                                        | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 4  | Nama instansi yang mengeluarkan dokumen SK penunjukan SSK                                                         | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 5  | Sekolah pernah mendapatkan sosialisasi tentang SSK dari BKKBN dan atau Disdalduk KB                               | Tidak pernah   | Tidak pernah  | Tidak pernah    |
| 6  | Terdapat guru yang telah mengikuti orientasi/pelatihan integrasi materi kependudukan pada mata pelajaran          | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 7  | Terdapat guru yang telah mengikuti orientasi/pelatihan penyusunan RPP/Modul ajar terintegrasi materi kependudukan | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 8  | Sekolah memiliki dokumen modul ajar atau RPP mata pelajaran yang terintegrasi materi kependudukan                 | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 9  | Jumlah modul ajar/RPP matapelajaran yang terintegrasi materi Bangsa Kencana                                       | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 10 | Telah dilaksanakan kegiatan penguatan SSK pada tahun berjalan                                                     | Tidak pernah   | Tidak pernah  | Tidak pernah    |
| 11 | Sekolah memiliki materi kependudukan dan pojok kependudukan                                                       | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |
| 12 | Jenis materi Bangsa Kencana yang tersedia di Perpustakaan atau pojok kependudukan                                 | Tidak ada      | Tidak ada     | Tidak ada       |

|    |                                                                                                              |            |            |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 13 | Sekolah memiliki sarana penunjang yang tersedia di perpustakaan atau Pojok Kependudukan                      | Ada        | Ada        | Ada       |
| 14 | Jumlah kegiatan ekstrakurikuler atau kesiswaan yang mengintegrasikan materi/substansi program Bangsa Kencana | 2 kegiatan | 2 kegiatan | Tidak ada |
| 15 | Kepuasan pelayanan pendampingan dari BKKBN/Dinas DaldukKB dan P/PLKB                                         | Puas       | Puas       | Puas      |

Sumber data: diolah oleh peneliti

Dari 3 sekolah yang mengikuti FGD semuanya belum memiliki dokumen Surat Keputusan tentang penetapan atau penunjukan sekolah pelaksana program SSK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire walaupun program ini telah lama disosialisasikan mulai tahun 2015. Analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menunjukkan adanya kegagalan struktural dan eksekusi program. Program yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun idealnya para pihak terkait dan pelaksana sudah memahami dengan baik peran dan kedudukannya terlebih bagi Dinas Pendidikan setempat yang sangat krusial perannya karena sebagai instansi yang berwenang menetapkan dokumen Surat Keputusan penetapan atau penunjukan sekolah dalam program SSK di wilayahnya sebagai dasar bagi pelaksana dalam melaksanakan program. Pada variabel sumber daya kondisi ini menunjukkan terjadi *mismanagement* dan kegagalan distribusi informasi dengan akibat yang fatal yaitu tidak berjalannya program SSK. Kondisi ini juga menunjukkan adanya masalah pada komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan. Jika pengurusan mandek maka pihak Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire seharusnya proaktif dalam mengawal baik melalui koordinasi resmi kedinasan dengan menyurat maupun mengutus secara langsung menanyakan progress. Fakta ini juga menunjukkan karakter agen pelaksana yang masih ego sektoral karena kedudukannya sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen Surat Keputusan yang nantinya dijadikan sebagai dasar bagi Dinas Dalduk dan KB untuk mengawal dan bagi sekolah untuk implementasi. Kondisi ini dari variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik menunjukkan Dinas Pendidikan dapat dinilai memandang program SSK hanya sekedar formalitas dan pada variabel disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan kurang peduli, kurang memiliki *sense of ownership* yang

tidak disadari dapat berakibat fatal dan berdampak pada jangka menengah maupun jangka panjang.

### **Hambatan pada implementasi program layanan SSK**

Berdasarkan penjelasan Bapak Sarles Brabar, SE, MSi Kepala Perwakilan kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua bahwa pelaksanaan program Layanan SSK yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua memiliki kekhususan sekaligus sebagai tantangan yakni dengan wilayah kerja 4 provinsi dengan 28 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang sangat luas dan sebagian besar memiliki keterbatasan pada infrastruktur menghadapi hambatan secara geografis dan rentang kendali. Ditinjau secara teori menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn kondisi ini berdampak pada beberapa aspek yaitu distorsi komunikasi, keterbatasan mobilisasi sumber daya dan lemahnya pengawasan pada organisasi pelaksana. Pada aspek Standar dan sasaran kebijakan program SSK secara realistis akan sulit di wilayah-wilayah terpencil yang secara letak dan infrastuktur terbatas. Dari aspek sumber daya pada kondisi wilayah yang luas dengan berbagai keterbatasan dibutuhkan anggaran operasional yang besar dan personel Penyuluh/Petugas lapangan KB yang memadai. Kendala ini dapat melemahkan fungsi kontrol misalnya kesulitan dalam melaksanakan supervisi ke dinas dan ke sekolah-sekolah. Kondisi ini juga dapat menghambat penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ke organisasi pelaksana apalagi dibarengi keterbatasan jaringan internet. Kondisi ini dapat menurunkan semangat baik penyuluh /petugas lapangan, Kepala sekolah dan guru pada program dapat terabaikan. Sebagian dari wilayah kerja binaan adalah daerah yang tertinggal baik secara ekonomi maupun infrastruktur maka dapat saja hal tersebut menjadi prioritas bagi Pemda setempat.

Selanjutnya menurut penjelasan Bapak Yulianus Kayame, S Sos, Kabid Dalduk DPPKB Kabupaten Nabire bahwa salah satu hambatan strategis yaitu belum disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan/GDPK dan Peta jalan Pembangunan Kependudukan/PJPK pada sehingga di Kabupaten Nabire belum ada Peraturan Daerah yang mengakomodir dan mendukung program SSK serta dampak pada ketidaktersediaan anggaran. Ditinjau dari tinjauan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn maka kondisi ini menyebabkan kebijakan program SSK di

daerah tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada standar keberhasilan program dan target indikator kinerja daerah. Hal ini terkait dengan variabel Standar dan Sasaran Kebijakan. Dampak lebih jauh yaitu ketidak tersediaan anggaran operasional. Dinas terkait dan sekolah dihadapkan pada kesulitan karena ketidak pastian dukungan. Hal ini terkait dngan variabel sumber daya. Karena ketiadaan Perda yang mengatur maka menyulitkan koordinasi lintas sektor dan koordinasi antar instansi yang terkait langsung dengan program SK yaitu Dinas Dalduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dinas lainnya menjadi lemah karena tidak memiliki dasar. Kondisi ini menyebabkan kecenderungan birokrasi bersikap pasif. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian seperti pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang menyatakan baru mengetahui dan mengenal adanya program SSK. Kondisi ini memiliki dampak nyata sesuai hasil isian evaluasi dan monitoring program yaitu tidak adanya Surat Keputusan tentang penunjukan atau penetapan Sekolah SSK. Ketiadaan Perda juga mencerminkan rendahnya kemauan politik dari Pemda dan DPRD setempat untuk mengawal isu kependudukan melalui jalur edukasi dini di sekolah-sekolah. Ketiadaan regulasi yang mendukung dapat menyebabkan penolakan secara tersamar atau ketidakpedulian atau pura-pura peduli karena menganggap program SSK bukan agenda yang harus disukseskan.

Permasalahan pada tingkat Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nabire sangat berpengaruh terhadap Sekolah-Sekolah sebagai pelaksana program. Sesuai dengan temuan penelitian berdasarkan penjelasan Ibu Dina Pijar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire belum menerbitkan Surat Keputusan penetapan SSK sebagai dasar hukum pelaksanaan SSK. Kondisi tersebut menunjukkan kegagalan implementasi akibat lemahnya dimensi aktivitas implementasi, komunikasi antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana. Pada variabel Standar dan Sasaran kebijakan dalam hal pelaksanaan SSK secara prosedur formal adanya penerbitan Surat keputusan tentang penunjukan atau penetapan sekolah pelaksana SSK. Jika sudah ada SK tersebut maka Dinas Dalduk dan KB serta pihak sekolah dapat menindaklanjuti dengan rencana aksi dan menyusun kepanitiaan atau pengurus sebagai penanggungjawab kegiatan. Ketiadaan SK penetapan atau penunjukan ini pada variabel komunikasi organisasi menunjukkan bahwa Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire bersikap menunggu bukan bersikap proaktif. Hal ini berakibat fatal yaitu menghambat eksekusi kebijakan yang seharusnya berjalan otomatis.

Ditinjau dari variabel Karakteristik agen pelaksana kondisi ini sesuai temuan peneliti yaitu pernyataan Ibu Dina Pijar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire bahwa Dinas Pendidikan akan mendukung program SSK tetapi menunggu arahan dari bupati sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan struktur birokrasi yang kaku dan bergantung pada figure pimpinan. Dalam kedudukannya sebagai sama-sama OPD seharusnya dapat dibahas terlebih dahulu pada level Kabid dan Kadis untuk mencari jalan keluar tanpa perlu menunggu dalam waktu yang lama. Dampak pada sekolah sangat terasa yaitu sekolah-sekolah yang secara struktural ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nabire tidak bisa berbuat apa-apa karena jika mengambil tindakan sendiri akan beresiko. Pada variabel Sikap implementor kondisi ini mengindikasikan kurangnya pemahaman mendalam tentang urgensi program oleh Disdikbud Kabupaten Nabire.

Sekolah sebagai satuan pelaksana program SSK juga menghadapi hambatan teknis yaitu kesulitan para guru dalam mengintegrasikan materi kependudukan/program Bangga Kencana pada mata pelajaran. Berdasarkan tinjauan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn maka kondisi ini memiliki pengaruh besar terlaksananya program SSK di sekolah. Pada variabel Standar dan Sasaran Kebijakan integrasi ini perlu penyiapan matang sehingga hal teknis yang harus dipahami dan dikuasai oleh guru dalam mendukung proses pembelajaran di kelas sesuai tujuan program. Kondisi ini jika dihubungkan dengan temuan penelitian yakni tidak adanya guru yang pernah mengikuti pelatihan atau orientasi tentang teknis pengintegrasian materi kependudukan atau program Bangga Kencana ke mata pelajaran memiliki korelasi yaitu kesulitan guru dalam mengimplementasikan materi. Para guru mengalami kesulitan karena integrasi itu tidak mudah. Temuan peneliti lainnya yakni ketidaktersediaan bahan literasi baik buku, modul, majalah, brosur, leaflet pada perpustakaan sekolah menunjukkan rendahnya sumber daya yang menghambat pada usaha mengadakan Pojok Kependudukan sebagai sarana utama literasi. Pada kondisi guru belum pernah mengikuti pelatihan dan minimnya sumber daya literasi yang mendukung hal ini berdampak pada psikologis para guru yang merasakan bertambahnya beban dan kesulitan. Program pelatihan dapat

meringankan beban ini apalagi jika sudah ada rancangan jadi integrasi materi kependudukan atau program Bangga Kencana pada setiap mata pelajaran sehingga guru tinggal menerapkannya. Jika perlu pada pelatihan dicontohkan langsung melalui contoh video pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam mengimplementasikannya di kelas. Pada variabel Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana maka kesulitan teknis mengintegrasikan materi para guru membutuhkan bantuan. Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikti Sainteks, Kemenag dan K/L lain yang terkait memiliki kapasitas dan sumber daya yang sangat memadai yakni para ahli dan pakar pada manajemen Pendidikan, pengajaran dan materi khusus yang jika berkolaborasi dapat menyediakan perangkat yang dapat digunakan untuk membantu kesulitan guru. Hal ini juga menjamin kualitas materi dari segi kesesuaian. Di sisi lain ditinjau dari variabel kondisi lingkungan pada materi kependudukan dan program Bangga Kencana di dalamnya terdapat materi-materi yang dapat dianggap sensitive atau hal tabu yang rawan menghadapi benturan nilai jika tidak dikemas dengan baik Ditinjau dari variabel disposisi pelaksana kesulitan integrasi materi pada mata pelajaran jika tidak ada bantuan kepada para guru maka dapat berdampak negative seperti kecenderungan mengabaikan integrasi sebagai realisme sikap negative atau abai. Sulit untuk mengharapkan adanya integrasi materi secara konsisten.

Permasalahan lain yang sangat krusial dihadapi oleh sekolah yaitu kesulitan dalam merealisasikan program Pojok Kependudukan di sekolah-sekolah. Menurut penjelasan Bapak Yunus Arwan, S Sos, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nabire bahwa sekolah mengalami kesulitan menyediakan buku, modul, RPP, majalah, leaflet, brosur untuk mengisi Pojok Kependudukan. Pojok kependudukan yang mungkin dianggap mudah direalisasikan tetapi ternyata sulit diwujudkan. Berdasarkan tinjauan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn kondisi ini merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan program dijalankan. Kondisi ini memiliki keterkaitan pada variabel Sarana dan Prasarana, Sumber daya dan Aksesibilitas. Pojok Kependudukan mempersyaratkan tersedianya buku-buku dan bahan literasi lain yang berwujud secara fisik dalam arti ada fisiknya dan tertata sehingga dapat dibaca. Sesuai dengan temuan peneliti yaitu hasil observasi di SMA Negeri 1 Nabire dan hasil wawancara dengan Ibu Pricilla, Kepala

Perpustakaan SMA Negeri 1 Nabire yaitu secara fisik sekolah memiliki Gedung/ruang perpustakaan yang cukup memadai namun dari segi ketersediaan pojok kependudukan dengan standar yang jelas yakni memiliki atau tersedia buku-buku dan bahan literasi lain yang berisikan materi kependudukan atau materi program Bangga Kencana tidak memenuhi. Pada variabel Sumber Daya pihak sekolah melalui pernyataan Kepala Perpustakaan yaitu untuk pengadaan buku-buku atau literasi pendukung tidak ada alokasi anggarannya. Selain itu untuk pengadaan buku-buku dan bahan literasi lain juga lumayan tinggi. Kesulitan yang dialami oleh sekolah-sekolah untuk mewujudkan Pojok Kependudukan ini juga perlu untuk memperoleh bantuan khususnya dari pihak-pihak yang mampu mendukung mewujudkan pojok Kependudukan. Hal ini ditinjau dari variabel Aksesibilitas dan sumber daya kondisi kesulitan mewujudkan Pojok Kependudukan merupakan umpan balik bagi Kemendukbangga/BKKBN dan para pihak khususnya pada tingkatan K/L untuk membuka akses dalam mendapatkan modul resmi. Buku-buku dan bahan literasi lain yang mungkin saja tersedia di pusat dan tidak digunakan akan lebih bermanfaat jika didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah. Jika perlu dianggarkan pencetakan dan penggandaan serta distribusi ke sekolah-sekolah. Pihak pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan Daerah dapat berkontribusi untuk membantu kesulitan ini dengan pengadaan buku yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Pada prinsipnya bagaimana menghadirkan secara fisik buku-buku dan bahan literasi tersebut sampai ke rak buku perpustakaan sekolah atau ke Pojok Perpustakaan merupakan bantuan nyata untuk mengatasi kesulitan ini.

### **Upaya optimalisasi implementasi program layanan SSK**

Pada upaya yang dilakukan oleh Perwakilan kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua dengan kegiatan webinar dan sosialisasi ditinjau dari teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn memiliki korelasi pada ke 6 variabel. Pada variabel Standar dan Sasaran kebijakan kegiatan ini dinilai tepat dalam menjebatani kebijakan menjadi tindakan nyata. Melalui kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana penyamaan persepsi para pihak yang dilibatkan pada program ini. Webinar dan sosialisasi juga menjadi solusi keterbatasan sumber daya manusia dan sumber dana namun tujuan dapat dicapai. Pada variabel karakteristik agen pelaksana hal ini juga menunjukkan peran Kemendukbangga

sebagai penggerak utama atau *leading sector* program SSK. Pada variabel Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana metode webinar dan sosialisasi dinilai efektif untuk transmisi informasi secara massal dan cepat namun kelemahannya yaitu potensi pemahaman peserta kurang optimal. Pada variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik maka pada webinar ini perlu pelibatan Dinas Pendidikan setempat sehingga mereka memiliki komitmen pada program SSK. Pada variabel sikap para pelaksana melalui kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan penerimaan positif pihak-pihak yang terlibat termasuk para guru yang melaksanakan di sekolah.

Pada upaya baik yang dilakukan oleh Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi dengan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire yaitu melalui pemberian target pembentukan 1 SSK untuk setiap Penyuluh/Petugas KB di wilayah kerjanya melalui inventarisasi, verifikasi dan pengusulan penunjukan/penetapan ke instansi yang berwenang hal ini ditinjau dari variabel-variabel pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn memiliki korelasi pada ke 6 variabel. Hal ini menunjukkan kejelasan indikator kuantitatif yang jelas, terukur dan tegas sesuai dengan variabel standar dan Sasaran Kebijakan. Bagi penyuluh /Petugas Lapangan KB sebagai sumber daya hal ini sebagai target dan juga memotivasi untuk mencapainya sebagai wujud tanggungjawab melalui upaya nyata di lapangan. Pada variabel hubungan antar organisasi dan karakteristik agen pelaksana upaya ini setidaknya melibatkan pihak Dinas Dalduk dan KB, Penyuluh dan Sekolah yang mana membutuhkan koordinasi yang baik dan diperlukan usaha keras untuk mencapainya. Pada aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik upaya ini akan menghadapi situasi seperti jauhnya wilayah dan kurangnya dukungan seperti transportasi. Hal ini perlu didukung kemampuan dan sikap yang solutif dan inovatif untuk merealisasikannya.

Analisa selanjutnya yaitu pada upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Pojok Kependudukan yang melibatkan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi, Dinas Dalduk Kabupaten Nabire dan pihak sekolah sebagai pelaksana. Ditinjau dari variabel Standar dan Sasaran Kebijakan pada upaya ini setidaknya disertai dengan indikator yang jelas misalnya apa saja koleksi buku yang perlu diadakan dan jumlah kunjungan siswa. Pada variabel sumber daya maka semua sekolah telah memiliki Gedung perpustakaan sebagai fasilitas. Pada variabel karakteristik

pelaksana dituntut peran dan kontribusi nyata untuk menyediakan buku dan materi, mendistribusikan sampai dengan menjamin buku-buku dan bahan literasi lain ada tersedia. Hal ini dari variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik akan berhasil jika didukung dengan komitmen kepala daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kepala Sekolah untuk memberikan dukungan nyata terhadap program. Pada aspek sikap atau disposisi pelaksana maka jika Pojok kependudukan sudah terwujud maka diperlukan kesadaran baik sikap, pemahaman dan terlebih tindakan nyata dalam memanfaatkan Pojok Kependudukan tersebut.

#### 4. Kesimpulan Dan Saran

Implementasi Program Layanan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Nabire belum berjalan optimal. Meskipun pelaksanaan program telah melibatkan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta sekolah sebagai satuan pelaksana, belum terdapat sekolah yang secara resmi terdaftar sebagai pelaksana SSK. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi dan komunikasi antarorganisasi, belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan, serta belum kuatnya dukungan regulasi dan anggaran di tingkat daerah. Implementasi program menghadapi berbagai faktor hambatan meliputi geografis, strategis, kebijakan, anggaran, manajerial, komunikasi organisasi dan operasional baik pada tingkatan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Nabire dan Sekolah-sekolah

Perlunya upaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, meningkatkan pendampingan dan penguatan ke sekolah-sekolah sebagai satuan pelaksana.

Disarankan kepada Kemendukbangga/BKKBN agar mempercepat pembentukan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua Tengah guna optimalisasi pembinaan dengan luasnya wilayah kerja dan mengalokasikan anggaran BOKB khusus untuk mendukung program SSK. Kepada Pemkab Nabire untuk menyusun PJPk dan GDPK serta menerbitkan Peraturan Bupati tentang program SSK di wilayah dan mengalokasikan anggarannya.

#### 5. Referensi

##### Buku-Buku :

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta

Icuk Rangga Bawono, Sustainable Development Goals, Universitas jendral Soedirman, Purwokerto

Iwan Nugroho, Rokhmin Dahuri, 2012, *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3S

Ika Sartika, Gatingsi, 2013, *Analisa Potensi Wilayah dan Daerah*, IPDN Jatinangor, Sumedang

Moleong, Lexy. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

Ndraha, T, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta

Noor,Juliansyah, 2016, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis,Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Prenada Media Grup/Kencana

Rustanto, B, 2014, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung, STKSPRESS

Sri Rumini dan Siti Sundari, 2004, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta

Suharto Budi R, 2020, *Teori Kependudukan*, Samarinda, RV Pustaka Horizon.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Jeffrey D Sachs, *The Age of Sustainable Development*, 2015

Van Meter, D, Van Horn, *The Policy Implementation Process*, 1975

Pramono, J, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*,Surakarta, UNISRI Press

##### Jurnal :

Yulia Kartikasari dan Nur Hidayah,2022, *Implementasi Program Sekolah siaga kependudukan pada SMAN 1Ngaglik Sleman*, Jurnal Kajian Sosiologi, Vol 10 No 2

Nur Lyedya dkk, 2024, *Implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai kabupaten hulu Sungai Utara* ; Jurnal Kebijakan Publik, Vol 1 Nomor 2

Maika Dian Agustin dan Rizki Apriliyani, 2022, *Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Pandemic Covid 19*, Sipakalebbi Vol 6 No 1

##### Sumber Lain :

Pusat Kajian Kepemudaan (Puskamuda), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kajian Karakteristik Pemuda Perkotaan, Universitas Indonesia

Pusat Studi Gender dan Anak, Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid 19, Universitas Muhamadiyah Alaudin Makassar

Majalah Sahabat Keluarga, SDM Jadi Fokus Program Penanganan Stunting di Papua Tengah, BKKBN, Edisi Mei 2024

Majalah Sahabat Keluarga, Peringati Hari Kependudukan Dunia, Kepala BKKBN : Kehamilan Usia Remaja Faktor Risiko Tinggi Kematian Ibu , BKKBN, Edisi Agustus 2024

Majalah Sahabat Keluarga, Hadir wakil Indonesia, BKKBN : PPD perkuat komitmen Negara Anggota Capai Pembangunan Berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) membentuk Generasi Emas 205 (30/10/2024)

DP3APPKB Salatiga, <https://dp3appkb.salatiga.go.id>, Hadapi Bonus Demografi melalui Sekolah Siaga Kependudukan ((5/11/2020)



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).